



PEMERINTAH PROVINSI BALI

ꦏꦺꦫꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

RENCANA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

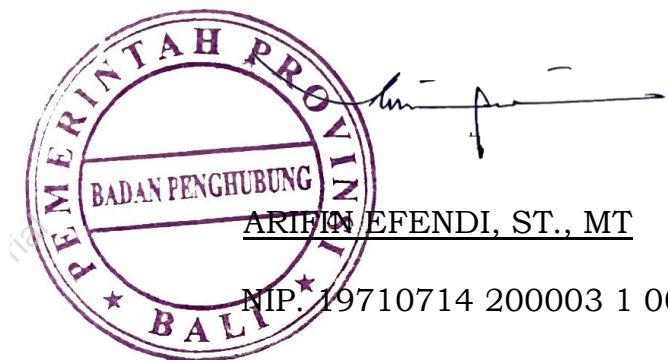
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RKPD Tahun 2023 dan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 21 Pebruari 2022, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Penghubung Provinsi Bali membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI



ARIFIN EFENDI, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	8
2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	28
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	28
3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi.....	35

3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali.....	55
3.2.1	Tujuan.....	55
3.2.2	Sasaran	56
3.3	Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	59
BAB V	P E N U T U P	62

LAMPIRAN :

1. Berita acara hasil kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah (FPD)
2. Daftar hadir (FPD)
3. Daftar usulan kegiatan FPD
4. Keputusan Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Renja Badan
Penghubung Tahun 2023
5. RKA Tahun 2023

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	8
TABEL 2	Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2021	10
TABEL 3	Target dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021	10
TABEL 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.....	13
TABEL 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung.....	20
TABEL 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023...	23
TABEL 7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	27
TABEL 8	Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	36
TABEL 9	Strategi dan arah kebijakan RPJMD 2019-2023.....	46
TABEL 10	Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Tahun 2023..	56
TABEL 11	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan alur perencanaan Badan Penghubung selaku salah satu SKPD di Pemprov Bali saat ini membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rancangan Akhir RENJA SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Rancangan RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, review rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional.

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu OPD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan capaian Renstra Badan Penghubung, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung, review

terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali, program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang terdiri dari 2 (dua) Program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

Bab V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali

Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali

Pada Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2019-2023. Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali 2019-2023, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Pelayanan Penghubung

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, yaitu :

A. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

TABEL 1

CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2021	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	84.91	80	84.91	106,14%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		85,50			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		92,51			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		73,29			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		88,33			

B. Capaian Kinerja Program

Tabel 2
Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2021

No	Program	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	80	84,91

C. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3
Target dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kinerja Anggaran	7.061.674.639,00	6.516.888.700,00

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali. Dari 2 (dua) program tersebut mengakomodir 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, yaitu peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

Secara rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 sudah melampaui target yaitu 84.91.

Faktor-faktor penghambat.

Secara umum beberapa faktor penghambat adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga PNS maupun tenaga kontrak di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- 2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan wisma dengan kondisi yang baik dan representatif, alat transportasi yang memadai, serta sarana promosi dan informasi seni budaya.

- 3) Penetapan target pendapatan yang terlampau tinggi.

- 5) Jumlah kamar/wisma dan bangunan wisma yang dijual terlalu sedikit dan sudah tidak representatif sehingga tidak

dapat bersaing dengan city hotel yang telah banyak dibangun di sekitar wisma

- 6) Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi seni budaya dan pembinaan umat bagi masyarakat Bali di Jakarta.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, perlu ditetapkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi dan informasi hasil pembangunan daerah Bali melalui pemeran kerajinan dan ekonomi serta pertunjukan/pagelaran-pagelaran kesenian.
3. Menurunkan target pendapatan PAD untuk tahun-tahun mendatang disesuaikan dengan realitas di lapangan
4. Melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Badan Penghubung baik itu kegiatan promosi seni budaya, pembinaan umat maupun kegiatan lain tanpa menggunakan APBD.

Tabel 4 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Badan Penghubung									
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat									
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	84.91	80	84.91	106%	90	88,86	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	84.91	80	84.91	106%	90	88,86	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang	12 laporan	4 keg	1 keg	1 keg	100%	12 laporan	6 laporan	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		ditingkatkan								
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	60 lap	36 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	6 laporan	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	60 lap	36 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	6 laporan	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	80.96	82	80.96	98,73%	82	81,44	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		evaluasi kinerja perangkat								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	33 dok	21 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	5 dok	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 orang	18 orang	18 orang	18 orang	100%	19 orang-	19 orang	-
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	60 dok	36 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi	10 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	9 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	1 paket	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket	12 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	3 paket	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Meningkatnya kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintah Daerah	daerah								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	25 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	3 unit	3 unit	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		umum yang disediakan								
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Mempermudah koordinasi pemerintahan daerah ke pusat
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta
4. Sebagai sarana promosi dan informasi budaya dan pariwisata Bali di Jakarta
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung.

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung dalam bentuk Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2019-2023 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta

- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta

Tabel 5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	75	80	90	90	85,96	84,91	90	90	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi :

Faktor Lingkungan *Internal*

A. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Adanya perangkat hukum memadai antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- 2) Mempunyai sarana promosi di Anjungan Daerah Bali sebagai *show window* Bali tentang kesenian dan kebudayaan.
- 3) Adanya wisma Badan Penghubung Provinsi Bali, alat transportasi pimpinan yang memadai.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- 2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan alat transportasi yang memadai, sarana promosi dan informasi berupa replika budaya dan seni, pamflet/brosur, VCD seni dan budaya.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sewa wisma/penginapan dan sewa pemakaian kekayaan daerah

berupa aula yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Bali

- 2) Badan Penghubung Provinsi Bali melalui Anjungan Daerah Bali sebagai media promosi seni dan budaya Bali di Jakarta

B. Ancaman (*Treats*)

- 1) Penetapan target yang terlampaui tinggi untuk PAD.
- 2) Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sudah tidak representatif dalam menerima tamu karena jumlah kamar yang sedikit dan kurangnya kenyamanan disebabkan bangunan wisma yang sudah tua dan banyak kerusakan permanen.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Tabel 6 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan :	JKT	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JKT	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	4.877.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	4.877.200	
	Sub kegiatan :					Sub kegiatan :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JKT	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	4.877.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	4.877.200	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JKT	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	4.519.064.091	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	4.354.985.847	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JKT	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	19 PNS	4.519.064.091	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS 12 dok	4.354.985.847	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JKT	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	205.425.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	188.789.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JKT	Jumlah paket komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	10.482.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	10.190.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JKT	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	30.674.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	30.674.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JKT	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	80,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	80,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	JKT	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	4 paket	8.425.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	4 paket	8.425.300	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JKT	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	75.844.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	59.501.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JKT	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	85.644.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	132.820.100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JKT	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	14 unit	85.644.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	8 unit	132.820.100	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKT	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.088.797.508	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.078.797.508	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JKT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	6,990,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JKT	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	205.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	205.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JKT	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 lap	878.797.508	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 lap	866.797.508	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKT	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.056.062.644	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	945.051.744	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JKT	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	833.270.528	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	803.759.628	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JKT	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JKT	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	4 unit	117.792.116	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	91.292.116	
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	JKT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.252.462.580	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.293.665.180	

g	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	JKT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.252.462.580	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1.293.665.180	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	JKT	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	53.362.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	45.569.600	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	JKT	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 lap	244.432.116	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 lap	239.617.116	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	JKT	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	954.668.464	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	1.008.478.464	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 21 Pebruari 2022 melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari stakeholder terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di Tahun 2023 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung yaitu fungsi sebagai pembantu pemerintah daerah dalam tugas koordinasi di Ibu Kota Jakarta dan sebagai *show window* kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Bali dan meningkatkan sarana promosi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Anjungan Daerah Bali TMII Jakarta. Adapun stakeholder Pemerintahan yang kami undang adalah :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
6. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
7. Kepala Biro Organisasi setda Provinsi Bali;
8. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.

Sedangkan stakeholder diluar pemerintah kami mengundang :

1. Direktur Eksekutif TMII di Jakarta
2. Ketua Parisada DKI Jakarta dan Wilayah;
3. Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Korwil DKI Jakarta;
4. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) DKI Jakarta dan Wilayah;
5. Ketua Paguyuban Sarathi Banten Se-jabodetabek
6. Ketua SDHD Jakarta Raya;
7. Pimpinan Sanggar Seni Se-jabodetabek;
8. Ketua PD KMHDI DKI Jakarta;
9. Ketua PERADAH DKI Jakarta.

Seluruh undangan kami undang secara virtual melalui link zoom. Ada banyak sekali masukan dan saran untuk Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2023.

Tabel 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Kerjasama dengan STAH Dharma Nusantara terkait event/ kegiatan/ eksebisi seni budaya dan keagamaan di Anjungan Bali TMII	Jakarta	terlaksananya kerjasama kegiatan	belum ditentukan	Usulan dari STAH Dharma Nusantara
2	Melaksanakan coaching clinic terkait wirausaha bagi pemuda Hindu	Jakarta	kegiatan coaching clinic	1 kali kegiatan	Usulan dari Peradah DKI Jakarta
3	Kegiatan sinergi antara Banhub, PHDI DKI, SDHD DKI, Pemprov DKI Jakarta, FKUB dan Kemenag RI	Jakarta	terlaksananya kegiatan sinergi	belum ditentukan	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
4	Meningkatkan promosi informasi terkait pemanfaatan Anjungan Bali, asrama Bali di Rawamangun dan Wisma Badan Penghubung di Cikini	Jakarta	peningkatan promosi dan informasi	1 di media IG 1 di media facebook 1 di media youtube	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
5	Pengusulan proposal hibah/bantuan ke pura di Jakarta atau terkait pembiayaan kegiatan-kegiatan pembinaan di Jakarta	Jakarta	Usulan proposal hibah	belum ditentukan	Usulan dari Biro Pem Kesra Setda Provinsi Bali
6	Adakan pelatihan Bahasa Bali di Anjungan Bali TMII	Jakarta	Terlaksananya pelatihan Bahasa Bali	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII
7	Menjalin kerjasama dengan Bank-Bank Daerah untuk mendapatkan CSR untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan di Anjungan Bali	Jakarta	Kegiatan kerjasama CSR	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Renja SKPD dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2023 disusun mengacu pada sasaran pada Perda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023.

3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

7. Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka sasaran dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran :

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia
2. Berkembangnya Kawasan Strategis berbasis industri dan pariwisata
3. Berkembangnya komoditas unggulan pendukung industri dan pariwisata
4. Berkembangnya kawasan perkotaan
5. Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi
6. Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal
7. Terpulihkannya daerah terdampak bencana
8. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata.
9. Berkembangnya kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah pengembangan industri, pariwisata dan investasi serta kawasan khusus lainnya.
10. Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan

5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pengembangan Wilayah Papua

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran :

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya

2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran :

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan

akses menuju pelayanan dasar

3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Infrastruktur Ekonomi
3. Infrastruktur Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi Digital

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline

Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal
2. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri
3. Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
4. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional

Program Prioritas :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2019-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD 2019-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Provinsi Bali 2019-2023

kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Tabel 8
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali
Tahun 2019-2023

MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI					
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	
			2	Peningkatkan pemenuhan	

				kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
	4	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan local	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi

				pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD		STRATEGI
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIA NYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				

Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur	
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA				
Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	

MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri
Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global		
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI		
Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1
		Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2
		Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3
		Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis

			Kebudayaan	
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH				
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI		
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN				
Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai

		inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali		produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
Meningkatnya pasar pariwisata Bali		Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global		Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat

ekonomi Bali		wilayah Bali		pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor

MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan public
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturnya pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparaturnya pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI	
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI			
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan	1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama

sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis			Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 9
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2019-2023

Strategi		Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali
7	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)

Strategi		Arah Kebijakan	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor	
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan	

13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
Strategi		Arah Kebijakan	
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat	
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha

			untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali di luar negeri
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali
Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali
		2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkuat jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali	

24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya	
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik	
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
		3	Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya
Strategi		Arah Kebijakan	
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas da fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan

			berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)
		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Modern)
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)
Strategi		Arah Kebijakan	
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan	

	Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	potensi daerah	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan destinasi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali	
Strategi		Arah Kebijakan	
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku

			usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia	
39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali	
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturn pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali	
41	Peningkatan koordinasi antara aparaturn pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan	
Strategi		Arah Kebijakan	
42	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali	

43	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
44	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru
45	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
46	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
47	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali ” melalui pola pembangunan semesta berencana, membangun Bali era baru. Ada 22 (dua puluh dua) misi untuk mewujudkan visi tersebut.

Badan Penghubung mengampu misi ke – 22 yaitu “MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH”.

Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, diantaranya :

Reformasi birokrasi, meliputi :

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsive)
2. Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, *reward dan punishment* dan system merit dalam birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali

Menunjuk pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023 maka telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

- Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

- Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

3.2.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 10 :

Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Target 2023
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2023 telah ditetapkan 2 (dua) program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG, dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Jumlah program yang direncanakan pada Renja Tahun 2023 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program dengan total 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 7,998,976,679,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG								7,998,976,679	8,740,000,000				
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6,705,311,499	7,360,000,000				
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,877,200	5,000,000				
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat		82 nilai	5 dokumen	100 %	4,877,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	5,000,000
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,354,985,847	4,600,000,000				
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas dokumen Administrasi Keuangan		82 nilai	12 dokumen 18 Orang/ Bulan	100 %	4,354,985,847	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	4,600,000,000
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								188,789,100	245,000,000				
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor		82 nilai	2 Paket	100 %	10,190,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	15,000,000
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor		82 nilai	3 Paket	100 %	30,672,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	35,000,000
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor		82 nilai	2 paket	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	85,000,000
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor		82 nilai	4 paket	100 %	8,425,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	10,000,000
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor		82 nilai	12 laporan	100 %	59,501,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	100,000,000
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								132,820,100	150,000,000				
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		82 nilai	8 unit	100 %	132,820,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	150,000,000
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,078,787,508	1,160,000,000				
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		82 nilai	12 laporan	100 %	6,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

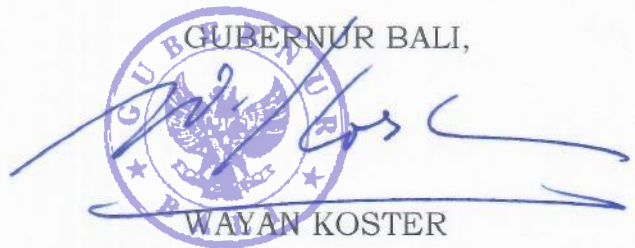
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		82 nilai	12 laporan	100 %	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	250,000,000
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		82 nilai	12 laporan	100 %	866,797,508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	900,000,000
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								945,051,744			1,200,000,000		
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		82 nilai	13 unit	100 %	803,759,628	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	900,000,000
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		82 nilai	3 unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	150,000,000
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah		82 nilai	4 unit	100 %	91,292,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	150,000,000
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								1,293,665,180			1,380,000,000		
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung								1,293,665,180			1,380,000,000		
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		90 indeks	12 laporan	90 indeks	45,569,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks	80,000,000
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		90 indeks	12 laporan	90 indeks	239,617,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks	300,000,000
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		90 indeks	12 laporan	90 indeks	1,008,478,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks	1,000,000,000
TOTAL													7,998,976,679			8,740,000,000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberi arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dimasing-masing Perangkat Daerah Provinsi Bali. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah merupakan dokumen strategis tahunan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, lebih lanjut akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah tercantum.

The image shows the official seal of the Governor of Bali, which is a circular emblem containing a Garuda (mythological bird) and the text 'GUBERNUR BALI'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'WAYAN KOSTER' is printed in blue capital letters.

GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER



ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
PEMERINTAH PROVINSI BALI

အစွဲအပ်ချက်

BADAN PENGHUBUNG

အလုပ်အကိုင်အရာရှိ/အရာရှိအဖွဲ့အစည်း (ဝန်ထမ်း) အဖွဲ့အစည်း
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
အလုပ်အကိုင်အရာရှိ (အလုပ်အကိုင်အရာရှိ)
JAKARTA (KODE POST 10330)
website : www.baliprov.go.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR : B.45.028/ 372 /Banhub

Pada Hari Senin tanggal dua puluh satu Bulan Pebruari Tahun dua ribu dua puluh dua, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Pebruari 2022

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Online via zoom meeting

Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022

MENYEPAKATI :

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Bali Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Pebruari 2022

Pimpinan Bidang

Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Arifin Efendi, ST, MT

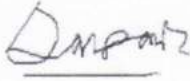
Pembina

NIP. 19710714 200003 1 003

Menyetujui

Wakil peserta Forum Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali

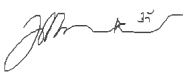
No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	I Made Sutrisna	STAH Dharma Nusantara	Jakarta	
2.	I Gusti Ngurah Arya U.P	PD KMHDI DKI Jakarta	Jakarta	

3.	Dewa Made Angga Wisnawa	PHDI DKI Jakarta	Jakarta	
4.	Jaya Purnawijaya	TMII	Jakarta	
5.	Gede Arya Sadewa	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Bali	
6.	Pindt. I Gde Suparta Putra SH	PSN DKI Jakarta	Bali	
7.	Luh Sutirthasari	Sanggar Tirthasari	Jakarta	

Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 Report

Form: Forum Perangkat Daerah Tahun 2022

Nama	I Made Sutresna
Instansi / Lembaga	STAH Dharma Nusantara
Jabatan	Ketua STAH
No. Telp / HP	08170108734
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 11:46:08
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I Made Jaya Negara Suarsa Putra
Instansi / Lembaga	STAH Dharma Nusantar Jakarta
Jabatan	Dosen
No. Telp / HP	081285919943
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 11:30:24
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I GUSTI NGURAH ARYA U.P
Instansi / Lembaga	PD KMHDI DKI Jakarta
Jabatan	Ketua
No. Telp / HP	089680148155
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 10:18:08
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Dewa Made Angga Wisnawa
Instansi / Lembaga	PHDI DKI Jakarta
Jabatan	Sekretaris Organisasi
No. Telp / HP	081387382320
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:39:57
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Jaya Purnawijaya
Instansi / Lembaga	TMII
Jabatan	Regional Platform Manager
No. Telp / HP	081284811311
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:39:43
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Gede Arya Sadewa
Instansi / Lembaga	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Jabatan	Analisis Pelayanan
No. Telp / HP	087722742152
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:39:17
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	NI KADEK IRADANI
Instansi / Lembaga	BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI
Jabatan	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
No. Telp / HP	081999832597
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:38:48
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	IB Yudhi Arnawa
Instansi / Lembaga	PHDI DKI Jakarta
Jabatan	Ketua PHDI DKI Jakarta
No. Telp / HP	0811809722
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:33:12
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Luh Sutirthasari
Instansi / Lembaga	Tirthasari
Jabatan	Pemilik
No. Telp / HP	0816805673
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:31:08
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ida Bagus Adi
Instansi / Lembaga	Dinas Pariwisata Prov. Bali
Jabatan	Kabid. Destinasi
No. Telp / HP	081338633172
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:53
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I Putu Hikariantara
Instansi / Lembaga	Sanggar Seni Nyalian Mas
Jabatan	General Afair
No. Telp / HP	081315785746
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:40
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I kt adhi saskarayasa
Instansi / Lembaga	Biro pemerintahan dan kesra
Jabatan	Kabag.kerjasama
No. Telp / HP	081337221925
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:36
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Pindt. I Gde Suparta Putra SH
Instansi / Lembaga	PSN DKI Jakarta
Jabatan	Ketua
No. Telp / HP	081316216009
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:24
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ni Ketut Rusmini Susilawati
Instansi / Lembaga	STAH DN JAKARTA
Jabatan	KABAG AUAK
No. Telp / HP	089643138969
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:28:02
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Gde Armen
Instansi / Lembaga	Sanggar Tari Tirthasari
Jabatan	Pelatih
No. Telp / HP	08128034648
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:26:42
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Made Bryan Pasek Mahararta
Instansi / Lembaga	Peradah DKI Jakarta
Jabatan	Ketua
No. Telp / HP	081216882171
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:26:38
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I Putu Suparta Jaya
Instansi / Lembaga	BAPPEDA Provinsi Bali
Jabatan	Perencana Ahli Muda
No. Telp / HP	085737441566
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 09:26:05
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ni Putu Susi Lestari, SIP, MAP
Instansi / Lembaga	Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali
Jabatan	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama Luar Negeri
No. Telp / HP	08179790477
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:56:06
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	Ni Putu
Instansi / Lembaga	
Jabatan	
No. Telp / HP	
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:54:17
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

Nama	I Putu Arys Julyandika,S.STP.,M.AP
Instansi / Lembaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
Jabatan	Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
No. Telp / HP	081353338626
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:52:14
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

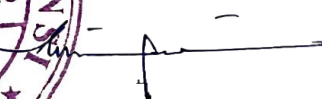
Nama	Tjok Istri Agung Damayanthi
Instansi / Lembaga	BPKAD Prov. Bali
Jabatan	Pemeriksa Anggaran
No. Telp / HP	081337738633
Tanda Tangan	
Added Time	21-Feb-2022 08:47:18
Referrer Name	
Task Owner	tu.penghubung.bali@gmail.com

**LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI BALI**
NOMOR : B.45.028/ 372 /Banhub
TANGGAL : 21 Pebruari 2021

**DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kerjasama dengan STAH Dharma Nusantara terkait event/ kegiatan/ eksebisi seni budaya dan keagamaan di Anjungan Bali TMII	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan dari STAH Dharma Nusantara
2	Melaksanakan coaching clinic terkait wirausaha bagi pemuda Hindu	DKI Jakarta	1 kali	Usulan dari Peradah DKI Jakarta
3	Kegiatan sinergi antara Banhub, PHDI DKI, SDHD DKI, Pemprov DKI Jakarta, FKUB dan Kemenag RI	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
4	Meningkatkan promosi informasi terkait pemanfaatan Anjungan Bali, asrama Bali di Rawamangun dan Wisma Badan Penghubung di Cikini	DKI Jakarta	1 di media IG 1 di media facebook 1 di media youtube	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
5	Pengusulan proposal hibah/bantuan ke pura di Jakarta atau terkait pembiayaan kegiatan-kegiatan pembinaan di Jakarta	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan dari Biro Pem Kesra Setda Provinsi Bali

1	2	3	4	5
6	Adakan pelatihan Bahasa Bali di Anjungan Bali TMII	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII
7	Menjalin kerjasama dengan Bank-Bank Daerah untuk mendapatkan CSR untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan di Anjungan Bali	DKI Jakarta	belum ditentukan	Usulan Direktur Eksekutif TMII


 Jakarta, 21 Pebruari 2022
 Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

ARIF EFENDI, ST., MT
 PEMBINA
 NIP. 19710714 200003 1 003



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali dan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan sub bagian/sub bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 FEBRUARI 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI BALI



ARIFIN EFENDI, ST., MT

PEMBINA

NIP. 19710714 200003 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.



ပီမိၼ်ႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁႃႈႁႃႈႁႃႈ

BADAN PENGHUBUNG
ႁႃႈႁႃႈႁႃႈ/ႁႃႈႁႃႈႁႃႈ (ဝဵင်း) ၼႃႈႁႃႈႁႃႈ
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
ႁႃႈႁႃႈ (ႁႃႈႁႃႈႁႃႈႁႃႈ)
JAKARTA (KODE POST 10330)
website : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR : 253 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembangunan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, tambahan lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan

Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali;
 - c. menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali;
 - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 Pebruari 2022
Kepala Badan Penghubung
Provinsi Bali,




Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 197107142000031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI NOMOR 253 TAHUN
2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023 BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI.

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023
Badan Penghubung Provinsi Bali.

- A. Penanggung Jawab : Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
- B. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- C Anggota : 1. Kepala Subbid Hubungan Antar Lembaga
2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Rumah
Tangga Pimpinan
3. Kepala Subbid Promosi dan Informasi

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Bali,



Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 197107142000031003

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Provinsi Bali, Tanggal _____
Kepala Badan Penghubung _____

Arifin Zendi, ST., MT
NIP. 197107142000031003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG				7,866,156,579	132,820,100	0	0	7,998,976,679	
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6,572,491,399	132,820,100	0	0	6,705,311,499	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,877,200	0	0	0	4,877,200	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,877,200	0	0	0	4,877,200	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,354,985,847	0	0	0	4,354,985,847	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,354,985,847	0	0	0	4,354,985,847	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				188,789,100	0	0	0	188,789,100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,190,500	0	0	0	10,190,500	
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,672,300	0	0	0	30,672,300	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	0	0	0	80,000,000	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,425,300	0	0	0	8,425,300	
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,501,000	0	0	0	59,501,000	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	132,820,100	0	0	132,820,100	
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	132,820,100	0	0	132,820,100	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,078,787,508	0	0	0	1,078,787,508	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,990,000	0	0	0	6,990,000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			205,000,000	0	0	0	205,000,000	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			866,797,508	0	0	0	866,797,508	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				945,051,744	0	0	0	945,051,744	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			803,759,628	0	0	0	803,759,628	
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	0	0	0	50,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,292,116	0	0	0	91,292,116	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				1,293,665,180	0	0	0	1,293,665,180	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1,293,665,180	0	0	0	1,293,665,180	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,569,600	0	0	0	45,569,600	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			239,617,116	0	0	0	239,617,116	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,008,478,464	0	0	0	1,008,478,464	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 94.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 94.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 94.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 94.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 4.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp. 4.000.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Sewa Auditorium				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp. 90.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp. 90.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
	::: Sewa Wisma Badan Penghubung				
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1 Tahun	Tahun	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
Grand Total :					Rp. 94.000.000
Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung  Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

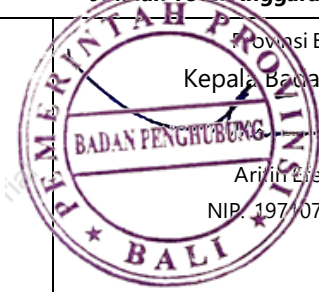
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</td><td>82 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Indikator	Target				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai				
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Unit	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 4.877.200				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.877.200
Keluaran	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	5 dokumen
Hasil	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		:				
		Indikator		Target		
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		5 dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.877.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.877.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.877.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.877.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 608.000
	[#] ASB 004 (Forum Perencanaan Perangkat Daerah)					Rp. 608.000
	[-] Foto Copy					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	300 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 180.000
	[-] Spanduk					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	10 Meter	Meter	42.800	0	Rp. 428.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.304.000

	[-] Kertas					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr maxi brite	20 Rim	Rim	65.200	0	Rp. 1.304.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 265.200
	[-] Tinta Epson					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664199Black 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	2 Buah	Unit	132.600	0	Rp. 265.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000
	[-] Nasi kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	60 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Snack kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.877.200
Jumlah total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.877.200
Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung Arihin Erenti, ST., MT NIP. 197107142000031003 						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	: <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</td><td>82 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Indikator	Target				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai				
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Unit	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 4.354.985.847				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.354.985.847
Keluaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	12 dokumen 18 orang
Hasil	Meningkatnya kualitas dokumen Administrasi Keuangan	100 %

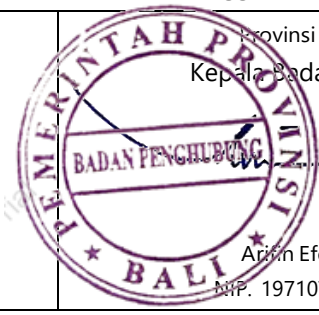
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah dokumen administrasi keuangan</td><td>12 dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>18 Orang/ Bulan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan
Indikator	Target											
Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen											
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.354.985.847						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.354.985.847						
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.307.397.847						
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 923.897.485						
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 923.897.485						
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp. 923.897.485						
	[-] Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		923.897.485	0	Rp. 923.897.485						
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 111.071.153						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 111.071.153						
	[#] belanja tunjangan keluarga PNS					Rp. 111.071.153						

	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		111.071.153	0	Rp. 111.071.153
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 49.077.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 49.077.000
	[#] tunjangan jabatan					Rp. 49.077.000
	[-] Tunjangan Jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		49.077.000	0	Rp. 49.077.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 43.050.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 43.050.000
	[#] belanja tunjangan fungsional umum					Rp. 43.050.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		43.050.000	0	Rp. 43.050.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 63.193.669
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 63.193.669
	[#] tunjangan beras					Rp. 63.193.669
	[-] Tunjangan Beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		63.193.669	0	Rp. 63.193.669
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.766.990
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.766.990
	[#] tunjangan PPh					Rp. 5.766.990
	[-] Tunjangan PPh					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.766.990	0	Rp. 5.766.990
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 18.712
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 18.712
	[#] pembulatan gaji					Rp. 18.712
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		18.712	0	Rp. 18.712
5.1.01.01.09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 96.920.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 96.920.000
	[#] belanja iuran jaminan kesehatan					Rp. 96.920.000
	[-] Belanja iuran Jaminan Kesehatan					
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		96.920.000	0	Rp. 96.920.000
5.1.01.01.10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.591.868
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.591.868
	[#] belanja iuran jaminan kecelakaan kerja					Rp. 2.591.868
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.591.868	0	Rp. 2.591.868
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 6.506.756
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 6.506.756
	[#] belanja iuran jaminan kematian					Rp. 6.506.756
	[-] Belanja iuran Jaminan Kematian					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		6.506.756	0	Rp. 6.506.756
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 5.304.214

5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 5.304.214
	[#] belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat					Rp. 5.304.214
	[-] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat					
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		5.304.214	0	Rp. 5.304.214
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.979.188.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 564.808.400
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 564.808.400
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja					Rp. 564.808.400
	[-] Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		85.550.400	0	Rp. 85.550.400
	[-] Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		39.540.800	0	Rp. 39.540.800
	[-] Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		118.534.000	0	Rp. 118.534.000
	[-] Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		136.396.000	0	Rp. 136.396.000
	[-] Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		184.787.200	0	Rp. 184.787.200
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp. 1.567.167.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp. 1.567.167.000
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas					Rp. 1.567.167.000
	[-] Eselon III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		103.767.000	0	Rp. 103.767.000
	[-] Eselon IV					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		397.800.000	0	Rp. 397.800.000
	[-] Pelaksana Golongan II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		340.800.000	0	Rp. 340.800.000
	[-] Pelaksana Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		724.800.000	0	Rp. 724.800.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 847.212.600
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 847.212.600
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja					Rp. 847.212.600
	[-] Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		128.325.600	0	Rp. 128.325.600
	[-] Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		59.311.200	0	Rp. 59.311.200

	[-] Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		177.801.000	0	Rp. 177.801.000
	[-] Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		204.594.000	0	Rp. 204.594.000
	[-] Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		277.180.800	0	Rp. 277.180.800
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 68.400.000
	[#] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp. 68.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		7.200.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembantu Urusan Penyiapan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembantu urusan verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembuat dokumen penerimaan dan penyetoran uang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembuat dokumen pengeluaran uang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembuat SPJ Fungsional					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Pengurus Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Urusan Akuntansi dan Pelaporan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000

	[-] Urusan penyiapan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Urusan verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.354.985.847
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.354.985.847
Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung  Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</td><td>82 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Indikator	Target				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai				
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Unit	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 188.789.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 188.789.100
Keluaran	Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	5 jenis
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						2 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.190.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.190.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.190.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.190.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.190.500
	[#] alat listrik lainnya					Rp. 329.300
	[-] Cable Tie (Nylon) 2,5x150mm (100pcs)					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Cable Tie (Nylon) 2,5x150mm (100pcs)	9 Bks	bks	18.500	0	Rp. 166.500
	[-] Isolasi 3 M					
	Alat Listrik Lainnya	11 Buah	buah	14.800	0	Rp. 162.800

	Spesifikasi : ISOLASI 3M.					
	[#] kabel listrik					Rp. 1.080.000
	[-] Kabel (Shinko) Ukuran 2x1,5mm2					
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel (Shinko) Ukuran 2x1,5mm2 / 300-500V	80 Meter	meter	13.500	0	Rp. 1.080.000
	[#] lampu					Rp. 8.473.200
	[-] Lampu Philips kapasitas 18W					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips Hemat Energi 18 Watt ESS Philips 18 Watt ESS	21 Buah	Buah	57.400	0	Rp. 1.205.400
	[-] Lampu Philips (LED) kapasitas 12w					
	Lampu Listrik Spesifikasi : lampu Lampu Philips (LED) kapasitas 12 W	20 Buah	buah	78.300	0	Rp. 1.566.000
	[-] Lampu Philips lurus/biasa 14W					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips Hemat Energi 14 Watt ESS Philips 14 Watt ESS	118 Buah	Buah	42.600	0	Rp. 5.026.800
	[-] Lampu Philips (Lurus/biasa) kapasitas 23w					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu listrik Lampu Philips (Lurus/biasa) kapasitas 23w	10 Buah	buah	67.500	0	Rp. 675.000
	[#] stop kontak					Rp. 308.000
	[-] Stop Kontak Universal					
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Universal	11 Buah	buah	28.000	0	Rp. 308.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.190.500
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator	Target	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.672.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.672.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.672.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.672.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.866.000
	[#] alat tulis kantor					Rp. 2.866.000
	[-] bolpoin Standard Penboldliner					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard Penboldliner	10 Pack	Pack	29.800	0	Rp. 298.000
	[-] Spanduk					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	5 Meter x 12 Kali	Meter	42.800	0	Rp. 2.568.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.830.000

	[#] kertas					Rp. 7.830.000
	[-] Kertas HVS 70 Gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 70Gsm	100 Rim	Rim	78.300	0	Rp. 7.830.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.659.200
	[#] alat-alat pel dan lap					Rp. 4.682.100
	[-] Gracia Serbet Kotak Besar 327917					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Gracia Serbet Kotak Besar 327917	4 Buah	Buah	60.200	0	Rp. 240.800
	[-] Kanebo/Plas Chamois 43x32x0.2 cm					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Kanebo/Plas Chamois / Kanebo/Plas Chamois / 43X32X0.2 Cm	18 Buah	Buah	16.700	0	Rp. 300.600
	[-] Kemoceng Microfiber					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Kemoceng / Kenmaster, Bahan Microfiber Extend Duster Ukuran 7X7X60 Cm	11 Buah	Buah	51.500	0	Rp. 566.500
	[-] lap kanebo					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : lap serap Kanebo	24 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 811.200
	[-] Lap Kuning					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Lap Kuning / Five Star	21 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 237.300
	[-] Pengepelan Sumbu					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Pengepelan Sumbu	7 Buah	Buah	114.800	0	Rp. 803.600
	[-] sikat cuci Nagata Sikat Lantai					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC Nagata	10 Buah	Buah	29.100	0	Rp. 291.000
	[-] Spons Cuci Piring					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Spons Cuci Piring Merk Polytex	87 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 356.700
	[-] Spray Mop - Alat Pel Lantai					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Alat Pembersih Lantai Marmer Spray Mop - Alat Pel Lantai	4 Buah	Buah	268.600	0	Rp. 1.074.400
	[#] keset dan tempat sampah					Rp. 2.386.100
	[-] polybag tempat sampah					
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Polybag Tempat Sampah	12 Buah	buah	106.900	0	Rp. 1.282.800
	[-] Tempat sampah tutup goyang 5 Liter					
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Tutup Goyang 5 Liter	17 Buah	buah	64.900	0	Rp. 1.103.300
	[#] perabot kantor lainnya					Rp. 191.200
	[-]					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Serok Pengki Jumbo	8 Buah	Buah	23.900	0	Rp. 191.200
	[#] sapu					Rp. 1.399.800

	[-] Sapu Ijuk Galunggung Super					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Galunggung Super	15 Buah	Buah	30.800	0	Rp. 462.000
	[-] Sapu Kasur					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Kasur Gepeng Putih Aa-Aa02-Aa0207-P	18 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 662.400
	[-] Sapu Taman					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi taman gagang kayu	17 Buah	Buah	16.200	0	Rp. 275.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.317.100
	[#] bahan kimia untuk pembersih					Rp. 2.797.500
	[-] Bagus komplit					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	18 Per Bungkus	Bungkus	58.000	0	Rp. 1.044.000
	[-] Pembasmi Serangga Baygon Super					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembasmi Serangga / Baygon Super	35 Botol	Botol	50.100	0	Rp. 1.753.500
	[#] Bahan Kimia Untuk Pembersih					Rp. 7.979.600
	[-] Pembersih Kaca Cling					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca / Cling	23 Botol	Botol	22.000	0	Rp. 506.000
	[-] Pembersih keramik porstek					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Keramik / Porstek 1 Liter	24 Botol	Botol	43.500	0	Rp. 1.044.000
	[-] Pembersih Lantai Super Pel					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Superpel 500MI	65 Pcs	Pcs	16.100	0	Rp. 1.046.500
	[-] Pewangi By Fresh					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pewangi / By Fresh 360Gr	3 Kaleng	Kaleng	217.500	0	Rp. 652.500
	[-] Rinso					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pencuci alat kebersihan / Rinso	26 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] sabun cuci tangan refill					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Refil sabun cuci tangan cair 5 liter / Sabun cair rifil pounh	12 Galon	Galon	155.300	0	Rp. 1.863.600
	[-] Sunlight					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabun cuci piring / Sunlight Cuci Piring 400MI	63 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 1.827.000
	[#] Pengharum Ruangan					Rp. 540.000
	[-] Pengharum Ruangan					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum ruangan gantung / glade	15 Buah		36.000	0	Rp. 540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.672.300

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	:	
	Indikator	Target
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 80.000.000
	[#] ASB 01					Rp. 65.000.000
	[-] Badan Penghubung di Cikini dan Anjungan Bali TMII					
	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Piodalan (Kantor/Badan Penghubung)	1 Tahun x 2 Tempat	Tahun	32.500.000	0	Rp. 65.000.000
	[#] ASB 02					Rp. 15.000.000
	[-] Badan Penghubung di Cikini dan Anjungan Bali TMII					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	2 Tempat	unit/Tahun	7.500.000	0	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.000.000

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	:	
	Indikator	Target
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.425.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.425.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.425.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.425.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.425.300
	[#] alat tulis kantor lainnya					Rp. 1.021.200
	[-] Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 11 x 23 Cm					
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna11 x 23 Cm Jaya Lem	69 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 227.700
	[-] Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 17 x 28 Cm HVS 80 g					
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna17 x 28 Cm HVS 80 g	69 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 338.100
	[-] Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 28 x 40 Cm Samson					

	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna28 x 40 Cm Samson	69 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 455.400				
	[#] barang cetakan					Rp. 5.365.700				
	[-] Foto copy Hitam Putih biasa									
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	7291 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 4.374.600				
	[-] Kwitansi 5 rangkap isi 100 set NCR 1/2folio									
	Barang Cetak Spesifikasi : Kwitansi 5 rangkap isi 100 set NCR 1/2 folio	17 Set	Set	58.300	0	Rp. 991.100				
	[#] stop map					Rp. 2.038.400				
	[-] Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo									
	Barang Cetak Spesifikasi : Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo	104 Pack	Pack	19.600	0	Rp. 2.038.400				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.425.300				
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</td><td>12 laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.501.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.501.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.500.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.500.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000				
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp. 3.000.000				
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 55.001.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.001.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.471.000				
	[#] perjalanan dinas luar daerah					Rp. 26.096.000				
	[-] Tiket Pesawat									
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	8 Kali	PP	3.262.000	0	Rp. 26.096.000				
	[#] taxi					Rp. 10.375.000				
	[-] Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Bali									
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	25 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp. 3.975.000				

	[-] Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Jakarta					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	25 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp. 6.400.000
	[#] uang harian					Rp. 12.000.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	25 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.530.000
	[#] Penginapan					Rp. 6.530.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 1.980.000
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 4.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 59.501.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 188.789.100
 Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</td><td>82 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Indikator	Target				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai				
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Unit	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 132.820.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.820.100
Keluaran	Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan pemerintah daerah	8 unit
Hasil	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan						8 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 132.820.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 132.820.100
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 16.775.100
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 16.775.100
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 8.310.600
	[#] Belanja Modal AC					Rp. 8.310.600
	[-]					
	A.C					
	Spesifikasi : Daikin 1/2 PK Standart 05MOO Watt 395	2 Unit	Unit	4.155.300	0	Rp. 8.310.600
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.464.500
	[#] TV LED					Rp. 8.464.500
	[-] TVLed Merek Panasonic 49 Inch					

	Televisi Spesifikasi : TVLed Merek Panasonic 49 Inch	1 Unit	Unit	8.464.500	0	Rp. 8.464.500
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 18.305.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 18.305.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 18.305.000
	[#] Belanja Modal Camera Digital					Rp. 18.305.000
	[-]					
	Camera Digital Spesifikasi : Kamera Digital Sony Alpha a7 III Mirrorless Digital Camera Kit With FE 28-70mm Lens	1 Unit	Unit	18.305.000	0	Rp. 18.305.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 97.740.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 97.740.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 97.740.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer					Rp. 97.740.000
	[-]					
	Peralatan personal komputer lainnya Spesifikasi : Hp Pc 280 Pro G5 Sff (I7, 8Gb, 1Tb, Amd 2Gb, Win10, 23.8In) Prosesor: Intel Core I7- 10700 Ram: 8Gb Kapasitas Penyimpanan: 1Tb Hdd Grafis: Amd Radeon R7 430 2Gb Sistem Operasi: Windows 10 Home Display: 23.8 Inch	4 Unit	Unit	24.435.000	0	Rp. 97.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 132.820.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 132.820.100
Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung  Anifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	: <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</td><td>82 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Indikator	Target				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai				
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Unit	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.078.787.508				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.078.787.508
Keluaran	Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis
Hasil	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

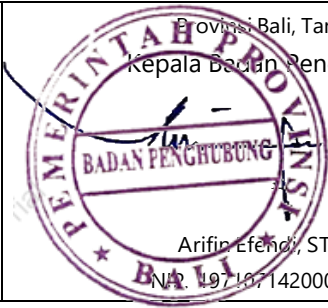
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</td><td>12 laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.990.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.990.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 990.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 990.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 990.000				
	[#] materai					Rp. 990.000				
	[-] materai 10.000									
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	90 Buah	Lembar	11.000	0	Rp. 990.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000				
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 6.000.000				
	[#] Paket pengiriman dokumen					Rp. 6.000.000				

	[-] paket pengiriman									
	Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi : Paket pengiriman surat dan dokumen Badan Penghubung melalui Kantor Pos maupun TIKI dan JNE	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.990.000				
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</td><td>12 laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 205.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 205.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 202.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 202.500.000				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 37.500.000				
	[#] Belanja Tagihan Telepon					Rp. 37.500.000				
	[-]									
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	37.500.000	0	Rp. 37.500.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 165.000.000				
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 165.000.000				
	[-]									
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja tagihan listrik Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	165.000.000	0	Rp. 165.000.000				
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.500.000				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.500.000				
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 2.500.000				
	[#] Lisensi ZOOM					Rp. 2.500.000				
	[-] lisensi zoom									
	Belanja Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi : Belanja Lisensi zoom Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 205.000.000				
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan</td><td>12 laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 866.797.508				

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 866.797.508
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 866.797.508
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 807.129.224
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 56.702.248
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 55.702.248
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
	[#] THR Tenaga Administrasi					Rp. 1.000.000
	[-] THR Tenaga administrasi di Cikini					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 340.213.488
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 334.213.488
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 334.213.488
	[#] THR Tenaga Kebersihan					Rp. 6.000.000
	[-] THR Tenaga Kebersihan					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	6 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 340.213.488
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 334.213.488
	[-] Tenaga Keamanan					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga keamanan di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 334.213.488
	[#] THR Tenaga Keamanan					Rp. 6.000.000
	[-] THR Tenaga Keamanan					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	6 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 70.000.000
	[#] Belanja pembayaran PBB/iuran/asosiasi pada Banhub					Rp. 70.000.000
	[-] PBB/iuran					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja pembayaran PBB/iuran/asosiasi Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 59.668.284
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 28.965.144
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 13.368.528
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 13.368.528

	Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung					
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 2.228.088
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 13.368.528
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 13.368.528
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.737.840
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 802.080
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 802.080
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 133.680
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 802.080
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 802.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 28.965.300
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 13.368.600
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 12.365.928
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 1.002.672
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 2.228.100
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non	12 Orang	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112

	ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	/ Bulan				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 13.368.600
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 12.365.928
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 1.002.672
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 866.797.508	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.078.787.508	
			Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung  Arifin Efendi, ST., MT NR. 197107142000031003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	: <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</td><td>82 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Indikator	Target				
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai				
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Unit	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 945.051.744				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 945.051.744
Keluaran	Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis
Hasil	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					13 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 803.759.628
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 803.759.628
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 254.382.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 254.382.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 254.382.700
	[#] oli pelumas					Rp. 11.541.700
	[-]					
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Shell HX6 10-40 1 Liter	83 Liter	liter	123.200	0	Rp. 10.225.600
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Agip Diesel Sigma Plus SAE 40 4 liter	3 Kaleng	Kaleng	438.700	0	Rp. 1.316.100

	[#] Pertamina					Rp. 219.600.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	18000 Liter	Liter	12.200	0	Rp. 219.600.000
	[#] Solar					Rp. 23.241.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar Non-Subsidi	1830 Liter	Liter	12.700	0	Rp. 23.241.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 509.376.928
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 472.657.984
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 453.617.984
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir					Rp. 445.617.984
	[-] Tenaga Sopir					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir pimpinan Di Badan Penghubung Cikini	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 445.617.984
	[#] THR Tenaga Sopir					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	8 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 19.040.000
	[#] Perpanjangan STNK Kendaraan					Rp. 19.040.000
	[-] pajak kendaraan dinas					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	19.040.000	0	Rp. 19.040.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 36.718.944
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 17.824.704
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir					Rp. 17.824.704
	[-] Tenaga Sopir					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 17.824.704
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.069.440
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 1.069.440
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 17.824.800
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 1.336.896
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 16.487.904
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas					Rp. 40.000.000

	Bermotor Perorangan									
	# Perawatan kendaraan dinas					Rp. 40.000.000				
	[-] pemeliharaan kendaraan dinas									
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : perawatan kendaraan dinas pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 803.759.628				
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</td><td>3 unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit
Indikator	Target									
Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 50.000.000				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 50.000.000				
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 50.000.000				
	# Pemeliharaan gedung bangunan pada Badan Penghubung					Rp. 50.000.000				
	[-] Pemeliharaan gedung kantor									
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja pemeliharaan gedung kantor Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000				
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</td><td>4 unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit
Indikator	Target									
Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.292.116				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.292.116				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 61.292.116				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.702.248				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 56.702.248				
	# Belanja Jasa Tukang Kebun					Rp. 55.702.248				
	[-] Tukang Kebun									

	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
	[#] THR Tenaga Tukang Kebun					Rp. 1.000.000
	[-] THR Tukang Kebun					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.589.868
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.228.088
	[#] Belanja Jasa Tukang Kebun					Rp. 2.228.088
	[-] Tukang Kebun					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 133.680
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.228.100
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset					Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan Genset					
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set Spesifikasi : Perawatan Genset pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan CCTV					Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan CCTV					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Perawatan CCTV	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Mebeulair					Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan mebeulair					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Perawatan meja kursi kantor pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.100.000
	[#] Pemeliharaan AC					Rp. 6.100.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan AC; AC Split)	10 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 6.100.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 13.600.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Home Use					Rp. 13.600.000
	[-] Laundry					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Laundry spre, selimut wisma Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Pemeliharaan Dispenser					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Dispenser pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan kulkas					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Kulkas pada Badan Penghubung	1 Tahun x 2 Unit	Tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan mesin cuci					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin cuci pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan TV					
	Pemeliharaan TV Spesifikasi : Pemeliharaan TV	4 Unit / Tahun	Unit/tahun	650.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.920.000
	[#] Pemeliharaan komputer					Rp. 2.920.000
	[-] Pemeliharaan komputer					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop)	4 Unit	Unit	730.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.380.000
	[#] Pemeliharaan printer					Rp. 1.380.000
	[-] Pemeliharaan printer					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Printer)	2 Unit	Unit	690.000	0	Rp. 1.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 91.292.116
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 945.051.744
			Provinsi Bali, Tanggal			

Arifin Feardi, ST., MT
Nip. 97107142000031003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Capaian Program :	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks

Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.293.665.180

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.293.665.180
Keluaran	Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubungt	3 sub kegiatan
Hasil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90 indeks

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan						12 laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.569.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.569.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.665.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.665.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.665.600
	[#] ASB 024 (Penyelenggaraan seminar)					Rp. 1.257.600
	[-] Seminar keagamaan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard	3 Kotak	Kotak	70.600	0	Rp. 211.800
	Barang Cetakn Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	30 Buah	Buah	13.900	0	Rp. 417.000

	[-] Seminar Kepemudaan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard	3 Kotak	Kotak	70.600	0	Rp. 211.800
	Barang Cetak Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	30 Buah	Buah	13.900	0	Rp. 417.000
	[#] Non ASB					Rp. 3.408.000
	[-] Seminar keagamaan					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	700 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 420.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	15 Meter x 2 Buah	Meter	42.800	0	Rp. 1.284.000
	[-] Seminar Kepemudaan					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	15 Meter x 2 Buah	Meter	42.800	0	Rp. 1.284.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	700 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000
	[#] ASB 024 (Penyelenggaraan seminar)					Rp. 13.000.000
	[-] Seminar keagamaan					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	50 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 5.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Seminar Kepemudaan					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	50 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 5.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000
	[-] Seminar keagamaan					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Seminar Kepemudaan					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.504.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.504.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.504.000
	[-] Seminar keagamaan					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000

	Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II									
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 3.262.000				
	[-] Seminar Kepemudaan									
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000				
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 3.262.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000				
	[#] Non ASB					Rp. 7.500.000				
	[-] Seminar keagamaan									
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Transportasi	30 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 3.000.000				
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Uang Saku	30 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp. 1.500.000				
	[-] Seminar Kepemudaan									
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Transportasi	30 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 3.000.000				
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Uang Saku	30 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp. 1.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.569.600				
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya</td><td>12 laporan budaya</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 laporan budaya
Indikator	Target									
Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 laporan budaya									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 239.617.116				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 239.617.116				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.125.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.125.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.280.000				
	[#] Spanduk					Rp. 4.280.000				
	[-]									
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	5 Meter x 20 Kali	Meter	42.800	0	Rp. 4.280.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.845.000				

	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp. 13.830.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	108 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 10.800.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	101 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 3.030.000
	[#] Snack					Rp. 3.015.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	201 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.015.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 218.492.116
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 213.902.248
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 157.200.000
	[#] dekorasi					Rp. 12.000.000
	[-] Dekorasi panggung					
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Panggung Seni bahan alam	1 Meter x 3 Kali	Meter ²	4.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] Jasa petugas tim kreatif seni					Rp. 7.200.000
	[-] pembuat konten kreatif					
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Petugas Tim Kreatif	48 Orang / Jam	orang/jam	150.000	0	Rp. 7.200.000
	[#] Jasa tenaga pelatih tari					Rp. 48.000.000
	[-] Jasa tenaga pengajar seni					
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Petugas Tim Kreatif	320 Orang / Bulan	orang/jam	150.000	0	Rp. 48.000.000
	[#] Paket pagelaran seni					Rp. 90.000.000
	[-] Paket pagelaran seni untuk mengisi acara di TMII					
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pergelaran/Pameran/Peragaan langsung/virtual/gabungan sedang	1 Kali	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pergelaran/Pameran/Peragaan langsung/virtual/gabungan kecil	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pergelaran/Pameran/Peragaan langsung/virtual/gabungan mini	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 56.702.248
	[#] Jasa tenaga administrasi					Rp. 56.702.248
	[-] Tenaga Administrasi					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248

	[-] THR Tenaga Administrasi Anjungan Bali						
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0		Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi						Rp. 4.589.868
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp. 2.228.088
	[-] Tenaga Administrasi						
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0		Rp. 2.228.088
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 133.680
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0		Rp. 133.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 2.228.100
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0		Rp. 167.112
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0		Rp. 2.060.988
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 239.617.116
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi :							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
Indikator						Target	
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung						12 laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 1.008.478.464
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 1.008.478.464
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 256.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 256.800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 55.000.000
	[#] Karangan bunga						Rp. 55.000.000
	[-] Karangan bunga						
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Karangan bunga segar pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0		Rp. 55.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 201.800.000
	[#] Belanja makanan dan minuman						Rp. 201.800.000
	[-]						
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman	2018	Orang/kali	100.000	0		Rp. 201.800.000

Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa		Orang / Kali				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 727.168.464
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 708.808.992
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 1.000.000
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 170.106.744
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 170.106.744
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	3 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 167.106.744
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 54.000.000
	[#] jasa pengawalan					Rp. 54.000.000
	[-] Patwal					
	Biaya Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Spesifikasi : DKI Jakarta	27 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 363.000.000
	[#] Transport Sopir pimpinan					Rp. 363.000.000
	[-] Sopir Gubernur					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Sopir Kepala Badan					
	Tambahan uang transport sopir pejabat Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.	12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	Rp. 33.000.000
	[-] Sopir Ketua DPRD					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Sopir Sekretaris Daerah					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Sekretaris Daerah	12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 42.000.000
	[-] Sopir Wakil Gubernur					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Sopir Wakil Ketua DPRD					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 144.000.000

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 55.702.248
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 55.702.248
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga protokol Di Badan Penghubung Cikini	12 Orang	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja jasa tol dan parkir					Rp. 50.000.000
	[-] Jasa tol dan parkir					
	Belanja Jasa Jalan/Tol Spesifikasi : Jasa tol dan parkir Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja pass bandara					Rp. 15.000.000
	[-] Pass Bandara					
	Belanja Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi : Pass Bandara Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 18.359.472
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.912.352
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 2.228.088
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 6.684.264
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 6.684.264
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 534.720
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 133.680
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 401.040
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 401.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 8.912.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 2.228.100
	[-] Tenaga Protokol					

	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 6.684.300
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 501.336
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 6.182.964
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.510.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.510.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.510.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah					Rp. 24.510.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	129 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 24.510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.008.478.464
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.293.665.180
			Provinsi Bali, Tanggal Kepala badan Penghubung  Arfin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PEMBIAYAAN
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah
6	PEMBIAYAAN			0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
Pembiayaan Netto :				Rp. 0
Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung  Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

